

ABSTRAK

Kewajiban perusahaan pertambangan mineral untuk melakukan pengolahan dan pemurnain hasil pertambangan mineral dengan melakukan pembangunan *smelter* telah diamanatkan sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diundangkan. Untuk mendorong perusahaan pertambangan mineral melakukan pembangunan *smelter*, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral yang tidak melakukan pembangunan *smelter*. Meskipun demikian, berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2018 bahwa hingga akhir tahun 2018 hanya 28 *smelter* yang terbangun dari 175 perusahaan pertambangan mineral yang ada di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral dalam rangka mendorong kewajiban pembangunan *smelter* ditinjau dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan hambatan dalam penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral dalam rangka mendorong kewajiban pembangunan *smelter*.

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif serta menggunakan penafsiran sistematis.

Hasil penelitian ini ialah penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral dalam rangka mendorong kewajiban pembangunan *smelter* yang diukur menggunakan teori penegakan hukum yaitu dari unsur struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum belum sepenuhnya dijalankan. Adapun hambatan dalam penegakan hukum bagi perusahaan pertambangan mineral adalah kurangnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga khususnya Verifikator Independen, berubah-ubahnya ketentuan mengenai kewajiban pembangunan *smelter*, sulitnya mendapatkan biaya atau modal untuk membangun *smelter* dari perbankan, dan masih rendahnya budaya hukum yaitu kesadaran hukum dari perusahaan pertambangan mineral untuk melaksanakan pembangunan *smelter*.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perusahaan Pertambangan Mineral, Smelter

ABSTRACT

The obligation of mineral mining companies to process and refine mineral mining products by constructing smelters has been mandated since Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining was promulgated. To encourage mineral mining companies to build smelters, the government issued Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 25 of 2018 concerning Mineral and Coal Mining Businesses which regulates law enforcement for mineral mining companies that do not build smelters. Nevertheless, based on the Performance Report of the Directorate General of Mineral and Coal of the Ministry of Energy and Mineral Resources in 2018 that until the end of 2018 only 28 smelters had been built from 175 mineral mining companies in Indonesia. Therefore this study aims to find out law enforcement for mineral mining companies in the context of encouraging smelter construction obligations in terms of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 25 of 2018 concerning Mineral and Coal Mining Enterprises and obstacles in law enforcement for mineral mining companies in the framework of encourage the obligation to build smelters.

This research method uses the normative juridical approach. Data collection techniques used in this research are literature study and analysis methods using qualitative juridical and systematic interpretation.

The results of this study are law enforcement for mineral mining companies in the context of encouraging smelter development obligations as measured using law enforcement theories, namely elements of legal structure, legal substance, and legal culture. The obstacles in law enforcement for mineral mining companies are the lack of supervision and coordination between institutions, especially Independent Verifiers, the changing provisions regarding the obligation to build smelters, the difficulty of obtaining costs or capital to build smelters from banks, and the still low legal culture, namely legal awareness from companies mineral mining to carry out smelter construction.

Keywords: *Law Enforcement, Mineral Mining Companies, Smelters*